

## PENGARUH INTEGRASI DANA ZAKAT DAN SISTEM JAMINAN SOSIAL TERHADAP HUMAN DEVELOPMENT INDEX DI KAWASAN TERTINGGAL INDONESIA

Dwiva Tia Amanda<sup>1</sup>, Mliladiah Dwi Lestari<sup>2</sup>, Retno Susilowati<sup>3</sup>, Budi Jaya Putra<sup>4</sup>  
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan  
[2300010013@webmail.uad.ac.id](mailto:2300010013@webmail.uad.ac.id) [2300010030@webmail.uad.ac.id](mailto:2300010030@webmail.uad.ac.id)  
[2300010003@webmail.uad.ac.id](mailto:2300010003@webmail.uad.ac.id) [budi.putra@lpsi.uad.ac.id](mailto:budi.putra@lpsi.uad.ac.id)

## Abstrak

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Meskipun *Human Development Index* (HDI) Indonesia terus mengalami peningkatan, masih terdapat kesenjangan pembangunan yang cukup tinggi pada kawasan tertinggal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat pembangunan manusia adalah melalui optimalisasi integrasi dana zakat dengan sistem jaminan sosial nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh integrasi dana zakat dan sistem jaminan sosial terhadap *Human Development Index* pada kawasan tertinggal di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *explanatory research*. Data yang digunakan dalam artikel ini merupakan data simulasi yang disusun untuk kepentingan pembelajaran akademik dengan mengacu pada karakteristik data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BPJS, dan berbagai publikasi pemerintah. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel. Hasil simulasi menunjukkan bahwa integrasi dana zakat berpengaruh positif terhadap peningkatan *Human Development Index*. Sistem jaminan sosial juga memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan manusia. Secara simultan kedua variabel mampu menjelaskan variasi *Human Development Index* pada kawasan tertinggal. Temuan ini menunjukkan bahwa sinergi antara *Islamic Social Finance* dan sistem perlindungan sosial berpotensi mempercepat pembangunan manusia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Human Development Index, Zakat, Islamic Social Finance, Sistem Jaminan Sosial, Kawasan Tertinggal*

## Article history

Received: Juli 2026

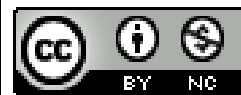
Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Plagiarism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 1. Pendahuluan

Pembangunan manusia merupakan tujuan utama pembangunan nasional yang menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Paradigma ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. *United Nations Development Programme* (UNDP) mengembangkan *Human Development Index* (HDI) sebagai indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi tersebut. Semakin tinggi nilai HDI suatu wilayah, semakin baik kualitas pembangunan manusia yang berhasil dicapai.[1]

Indonesia menunjukkan tren peningkatan *Human Development Index* dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, nilai HDI nasional meningkat secara konsisten seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan riil per kapita masyarakat. Namun demikian,

peningkatan tersebut belum diikuti oleh pemerataan pembangunan antardaerah. Kawasan tertinggal masih menghadapi berbagai tantangan berupa keterbatasan akses pendidikan, rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, tingginya tingkat kemiskinan, terbatasnya infrastruktur, serta rendahnya produktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan capaian pembangunan manusia di kawasan tertinggal masih berada di bawah rata-rata nasional.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk mempercepat pembangunan manusia melalui peningkatan investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Salah satu instrumen yang memiliki peran strategis adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diimplementasikan melalui berbagai program seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.[2]

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan Outlook Zakat Indonesia 2025, potensi penghimpunan zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, namun realisasi penghimpunannya masih jauh di bawah potensi yang tersedia. Padahal, zakat merupakan instrumen *Islamic Social Finance* yang memiliki fungsi redistribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan produktif.[3]

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat dan sistem jaminan sosial memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan manusia. Distribusi zakat pada sektor pendidikan dan kemanusiaan berpengaruh positif terhadap Human Development Index di Indonesia.[4] Sementara itu, laporan *World Bank* tahun 2024 dan *International Labour Organization* tahun 2021 menunjukkan bahwa sistem perlindungan sosial yang efektif mampu meningkatkan kualitas modal manusia, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih mengkaji kedua instrumen tersebut secara terpisah sehingga belum banyak penelitian yang menganalisis pengaruh integrasi dana zakat dan sistem jaminan sosial terhadap pembangunan manusia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh integrasi dana zakat dan sistem jaminan sosial terhadap *Human Development Index* pada kawasan tertinggal di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai sinergi *Islamic Social Finance* dan kebijakan perlindungan sosial sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga pengelola zakat dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mempercepat pembangunan manusia di kawasan tertinggal.

## 2. Tinjauan Pustaka

### *Human Development Theory* (Amartya Sen)

*Human Development Theory* Teori pembangunan manusia (*Human Development Theory*) merupakan salah satu teori utama yang menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui

peningkatan kualitas hidup manusia.[4] Paradigma ini berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan pembangunan konvensional yang lebih menitikberatkan pada indikator ekonomi makro, seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tanpa memperhatikan kualitas kehidupan masyarakat. Pembangunan seharusnya dipahami sebagai proses memperluas kebebasan (*expansion of human freedoms*) sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara produktif, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.[5] Dengan demikian, manusia bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek utama yang menentukan keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Konsep yang diperkenalkan Sen dikenal sebagai *Capability Approach*, yaitu pendekatan yang menilai kesejahteraan berdasarkan kemampuan (*capabilities*) seseorang untuk memilih dan menjalani kehidupan yang dianggap bernilai.[6] Kemampuan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tetapi juga oleh akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, lingkungan yang aman, serta kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan manusia harus diarahkan pada peningkatan kemampuan individu dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.[6]

*Capability Approach* membedakan antara *functionings* dan *capabilities*. *Functionings* menggambarkan berbagai kondisi yang berhasil dicapai seseorang, seperti sehat, berpendidikan, atau memiliki pekerjaan yang layak. Sementara itu, *capabilities* merupakan peluang atau kebebasan yang dimiliki individu untuk mencapai kondisi tersebut. Dalam perspektif ini, pembangunan yang berhasil bukan hanya menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang bermartabat.[6] Dengan demikian, pembangunan manusia harus dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, kelembagaan, dan budaya.

Pemikiran Sen kemudian menjadi dasar bagi *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam mengembangkan *Human Development Index* (HDI) pada tahun 1990. HDI digunakan sebagai indikator komposit yang mengukur keberhasilan pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Penggunaan HDI menunjukkan perubahan paradigma pembangunan dari *growth-oriented development* menuju *people-centered development*, yaitu pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.[6] Hingga saat ini, HDI menjadi salah satu indikator pembangunan yang digunakan secara luas oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan manusia.

Dalam konteks negara berkembang, *Human Development Theory* memiliki relevansi yang sangat tinggi karena banyak negara masih menghadapi persoalan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, rendahnya kualitas pendidikan, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, serta lemahnya sistem perlindungan sosial. Sen menegaskan bahwa kemiskinan bukan sekadar rendahnya pendapatan, tetapi merupakan bentuk *deprivation of capabilities*, yaitu hilangnya kesempatan individu untuk menjalani kehidupan yang berkualitas. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan harus diarahkan pada penghapusan berbagai hambatan yang mengurangi kemampuan masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang lebih baik.[6]

Perkembangan penelitian dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa *Human Development Theory* masih menjadi salah satu landasan konseptual utama dalam studi pembangunan manusia. Menurut *Human Development Report* (UNDP) tahun 2024, peningkatan *Human Development Index* dipengaruhi oleh investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, kualitas institusi, dan pemerataan pembangunan. Di sisi lain, berbagai krisis global seperti pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan ketidakstabilan ekonomi telah memperlihatkan pentingnya pembangunan manusia yang tangguh (*resilient human development*). Oleh karena itu, pembangunan manusia tidak hanya berorientasi pada peningkatan indikator HDI, tetapi juga pada kemampuan masyarakat menghadapi berbagai risiko sosial-ekonomi di masa depan.

Dalam perspektif kebijakan publik, *Human Development Theory* menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam menyediakan pelayanan dasar yang berkualitas melalui investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun demikian, keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya bergantung pada pemerintah. Berbagai lembaga sosial, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan institusi keagamaan juga memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sinergi antaraktor tersebut menjadi salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan.[6]

Dalam konteks Indonesia, salah satu bentuk sinergi tersebut dapat diwujudkan melalui integrasi antara *Islamic Social Finance*, khususnya dana zakat, dengan sistem perlindungan sosial nasional. Dana zakat yang dikelola secara produktif dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kapasitas masyarakat miskin. Sementara itu, sistem jaminan sosial memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko sosial melalui penyediaan layanan kesehatan, bantuan sosial, serta jaminan kesejahteraan. Integrasi kedua instrumen tersebut diharapkan mampu memperluas *capabilities* masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan *Human Development Index*, khususnya di kawasan tertinggal Indonesia.[7]

Berbagai penelitian empiris juga mendukung hubungan antara *Human Development Theory* dengan pembangunan berbasis keuangan sosial Islam. Pengelolaan *Islamic Social Finance* yang terintegrasi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.[8] Distribusi zakat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan *Human Development Index* di Indonesia.[9] Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa perluasan kemampuan masyarakat melalui instrumen sosial dan kebijakan publik sejalan dengan konsep pembangunan manusia yang dikemukakan oleh Sen.

Berdasarkan uraian tersebut, *Human Development Theory* menjadi *grand theory* dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan hubungan konseptual antara integrasi dana zakat, sistem jaminan sosial, dan *Human Development Index*. Integrasi kedua instrumen tersebut dipandang sebagai upaya memperluas kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan kehidupan yang lebih sejahtera. Dengan demikian, semakin baik integrasi dana zakat dan sistem jaminan sosial, maka semakin besar peluang peningkatan *Human Development Index* pada kawasan tertinggal di Indonesia.

## ***Human Development Index (HDI/IPM)***

*Human Development Index (HDI)* atau dalam konteks Indonesia dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Berbeda dengan indikator ekonomi tradisional yang hanya berorientasi pada pertumbuhan pendapatan, HDI menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan dengan mengukur kemampuan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang sehat, memperoleh pendidikan yang memadai, dan menikmati standar hidup yang layak. Sejak pertama kali diperkenalkan dalam *Human Development Report* tahun 1990 oleh Mahbub ul Haq bersama Amartya Sen, HDI telah menjadi salah satu indikator pembangunan yang digunakan secara luas oleh berbagai negara sebagai dasar evaluasi kebijakan pembangunan manusia.[10]

Konsep dasar HDI berangkat dari pemikiran bahwa pembangunan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan output ekonomi, tetapi juga harus memperluas pilihan hidup (*expanding people's choices*). Kesejahteraan manusia tidak dapat diukur hanya melalui tingkat pendapatan karena individu memerlukan kemampuan (*capabilities*) untuk mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan berbagai kesempatan lainnya. Oleh karena itu, HDI dirancang untuk mengukur keberhasilan pembangunan secara multidimensional sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas hidup masyarakat dibandingkan indikator ekonomi semata.[11]

HDI dibangun berdasarkan tiga dimensi utama pembangunan manusia. Dimensi pertama adalah umur panjang dan hidup sehat, yang diukur menggunakan indikator angka harapan hidup saat lahir (*life expectancy at birth*). Dimensi ini mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat serta keberhasilan pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin baik kondisi kesehatan masyarakat sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan HDI.[12]

Dimensi kedua adalah pengetahuan (*education*) yang diukur melalui dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*). Harapan lama sekolah menggambarkan jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia sekolah apabila pola pendidikan saat ini terus berlangsung. Sementara itu, rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Kedua indikator tersebut mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.[13]

Dimensi ketiga adalah standar hidup layak (*decent standard of living*) yang diukur menggunakan *Gross National Income (GNI)* per capita berdasarkan *Purchasing Power Parity (PPP)* pada tingkat internasional. Dalam publikasi Badan Pusat Statistik, indikator tersebut disesuaikan menjadi pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan (*adjusted real expenditure per capita*). Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Pendapatan yang tinggi memungkinkan masyarakat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, gizi, perumahan, serta kebutuhan dasar lainnya sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Ketiga dimensi tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi. Peningkatan akses pendidikan akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik. Sebaliknya, masyarakat yang sehat memiliki produktivitas yang lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Hubungan timbal balik tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia harus dilakukan secara terpadu melalui investasi pada seluruh dimensi pembangunan.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metodologi HDI yang mengacu pada standar UNDP dengan beberapa penyesuaian terhadap karakteristik nasional. Berdasarkan klasifikasi BPS (2025), nilai IPM dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu sangat tinggi ( $\geq 80$ ), tinggi (70-79,99), sedang (60-69,99), dan rendah ( $< 60$ ). Klasifikasi ini digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan pembangunan manusia di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Perbedaan nilai IPM antarwilayah mencerminkan adanya kesenjangan pembangunan yang memerlukan intervensi kebijakan secara lebih terarah.

Perkembangan IPM Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan pembangunan antardaerah. Kawasan tertinggal masih menghadapi berbagai hambatan seperti rendahnya akses terhadap fasilitas kesehatan, kualitas pendidikan yang belum merata, keterbatasan infrastruktur dasar, tingginya angka kemiskinan, serta rendahnya produktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan capaian IPM di kawasan tertinggal masih berada di bawah rata-rata nasional.[14] Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang mampu mengatasi berbagai hambatan tersebut secara simultan.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa peningkatan HDI dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi maupun non-ekonomi. Faktor ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat, investasi pemerintah, dan kesempatan kerja. Sementara itu, faktor non-ekonomi meliputi kualitas institusi, tata kelola pemerintahan, perlindungan sosial, distribusi pendapatan, serta pembangunan sosial berbasis masyarakat.[15] Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian akademisi juga mulai mengarah pada peran *Islamic Social Finance*, khususnya zakat, sebagai salah satu instrumen yang mampu mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, HDI juga memiliki hubungan yang erat dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan SDGs seperti penghapusan kemiskinan (*No Poverty*), kehidupan sehat dan sejahtera (*Good Health and Well-being*), pendidikan berkualitas (*Quality Education*), pekerjaan layak (*Decent Work and Economic Growth*), serta pengurangan ketimpangan (*Reduced Inequalities*) secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan HDI. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pembangunan manusia pada tingkat nasional maupun internasional diarahkan untuk mendukung pencapaian target SDGs secara berkelanjutan.[16]

Dalam penelitian ini, *Human Development Index* digunakan sebagai variabel dependen (Y) karena mampu menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia secara komprehensif. Integrasi dana zakat diperkirakan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan kegiatan produktif sehingga berdampak positif terhadap peningkatan HDI. Demikian pula, sistem jaminan sosial diharapkan mampu memperluas

perlindungan masyarakat terhadap berbagai risiko sosial-ekonomi sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, peningkatan integrasi dana zakat dan efektivitas sistem jaminan sosial diperkirakan akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Human Development Index pada kawasan tertinggal di Indonesia.

## **Zakat dan *Islamic Social Finance***

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi. Secara etimologis, kata *zakat* berasal dari bahasa Arab *zakā* yang berarti suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Secara terminologis, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang telah memenuhi syarat (*nisab* dan *haul*) untuk diberikan kepada golongan penerima (*mustahik*) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kewajiban zakat ditegaskan dalam Al-Qur'an, di antaranya pada QS. At-Taubah ayat 103 yang menjelaskan bahwa zakat berfungsi menyucikan harta dan jiwa, serta dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang mengatur delapan golongan penerima zakat (*asnaf*). Selain itu, zakat juga merupakan rukun Islam ketiga yang memiliki kedudukan penting dalam membangun keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.[17]

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Zakat berfungsi mengurangi kesenjangan ekonomi melalui mekanisme transfer kekayaan dari kelompok masyarakat yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan.[18] Dengan demikian, zakat memiliki peran strategis dalam menekan kemiskinan, meningkatkan konsumsi rumah tangga miskin, memperkuat daya beli masyarakat, dan menciptakan stabilitas sosial-ekonomi. Berbeda dengan sistem perpajakan yang berorientasi pada penerimaan negara, zakat memiliki orientasi ibadah sekaligus pemberdayaan sosial yang bertujuan menciptakan keseimbangan distribusi kekayaan dalam masyarakat.

Seiring perkembangan ekonomi Islam modern, konsep zakat mengalami perluasan fungsi dari sekadar bantuan konsumtif menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang produktif. Pendayagunaan zakat tidak lagi hanya diberikan dalam bentuk bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi, pembiayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Pendekatan ini dikenal sebagai zakat produktif, yaitu pengelolaan zakat yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Pergeseran paradigma tersebut menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen pembangunan yang mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam dua dekade terakhir, konsep *Islamic Social Finance* (ISF) berkembang sebagai pendekatan yang mengintegrasikan berbagai instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. *Islamic Social Finance* bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana sosial Islam secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada distribusi bantuan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan sektor produktif, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, *Islamic Social Finance* dipandang sebagai salah satu instrumen yang mampu

mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengurangan ketimpangan.

Model integrasi *Islamic Social Finance* yang menggabungkan berbagai instrumen sosial Islam dalam satu kerangka tata kelola. Model tersebut menunjukkan bahwa integrasi zakat, wakaf, infak, dan sedekah melalui pendekatan 4 ER (*Economic Rescue*, *Economic Recovery*, *Economic Reinforcement*, dan *Economic Resilience*) lebih efektif dibandingkan pengelolaan secara terpisah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program *Islamic Social Finance* yang terintegrasi mampu meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat sekitar 12% dibandingkan program yang tidak terintegrasi. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa sinergi antar-instrumen keuangan sosial Islam dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang bertugas mengoordinasikan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi. Dengan adanya kerangka kelembagaan tersebut, zakat diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keagamaan, tetapi juga sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan sosial yang mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar mengingat mayoritas penduduk beragama Islam. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat masih jauh di bawah potensi yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan dana zakat, yang dipengaruhi oleh tingkat literasi zakat, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, kepatuhan muzaki, serta efektivitas sistem penghimpunan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan zakat melalui digitalisasi layanan, penguatan tata kelola, peningkatan transparansi, serta integrasi dengan program pembangunan nasional.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa zakat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan. *Islamic Social Finance* berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung penurunan tingkat kemiskinan melalui penguatan tata kelola dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian lain menunjukkan bahwa distribusi zakat yang diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi memiliki dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan dibandingkan distribusi yang bersifat konsumtif semata. Hasil-hasil tersebut memperlihatkan bahwa zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi produktif.

Meskipun demikian, efektivitas zakat sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola lembaga pengelola zakat. Pengelolaan yang profesional, transparan, akuntabel, serta terintegrasi dengan kebijakan pembangunan pemerintah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mendorong peningkatan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Sebaliknya, pengelolaan yang belum optimal dapat mengurangi dampak zakat terhadap pembangunan manusia. Oleh karena itu, berbagai penelitian menekankan pentingnya integrasi antara *Islamic Social Finance* dan kebijakan publik agar zakat tidak hanya berfungsi sebagai

bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam penelitian ini, integrasi dana zakat didefinisikan sebagai sinergi pengelolaan dan pendayagunaan zakat dengan program pembangunan pemerintah, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial. Integrasi tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar sehingga meningkatkan kemampuan (*capabilities*) sebagaimana dijelaskan dalam *Human Development Theory*. Dengan demikian, semakin efektif integrasi dana zakat dengan kebijakan pembangunan, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan *Human Development Index* (HDI), terutama di kawasan tertinggal Indonesia.

## **Sistem Jaminan Sosial (*Social Protection Theory*)**

### **a. Konsep Sistem Jaminan Sosial**

Sistem jaminan sosial (*social security system*) merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan kesejahteraan negara (*welfare state*) yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi sepanjang siklus kehidupan. Risiko tersebut meliputi kemiskinan, pengangguran, kecelakaan kerja, penyakit, kecacatan, usia lanjut, hingga kematian pencari nafkah. Melalui sistem jaminan sosial, negara berupaya menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sehingga setiap individu tetap dapat mempertahankan kualitas hidup yang layak meskipun mengalami berbagai risiko sosial tersebut.[19]

Menurut *International Labour Organization* (ILO), perlindungan sosial merupakan seperangkat kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap berbagai risiko ekonomi dan sosial, sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui penyediaan jaminan pendapatan, akses terhadap pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan berbagai bentuk perlindungan lainnya. Perlindungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penanggulangan kemiskinan, tetapi juga sebagai investasi pembangunan manusia (*social investment*) yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, sistem jaminan sosial dipandang sebagai investasi pada modal manusia (*human capital investment*). Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah pada sektor perlindungan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### **b. *Social Protection Theory***

*Social Protection Theory* menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko sosial sepanjang siklus kehidupan. Kerangka perlindungan sosial yang terdiri atas empat fungsi utama, yaitu *protective*, *preventive*, *promotive*, dan *transformative*.

Fungsi *protective* bertujuan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin melalui program bantuan sosial, subsidi, dan bantuan tunai sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar. Fungsi *preventive* bertujuan mencegah masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan melalui penyediaan asuransi sosial, jaminan kesehatan, dan perlindungan ketenagakerjaan. Selanjutnya, fungsi *promotive* diarahkan pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, dan

pemberdayaan ekonomi. Adapun fungsi *transformative* bertujuan mengurangi ketimpangan sosial melalui kebijakan yang mendorong keadilan, inklusi sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.[20]

Keempat fungsi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan sosial bukan sekadar memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Oleh karena itu, *Social Protection Theory* memiliki hubungan yang erat dengan *Human Development Theory* yang dikemukakan Sen tahun 1999, karena keduanya sama-sama menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.

### **c. Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia**

Di Indonesia, sistem jaminan sosial diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Implementasi SJSN dilakukan melalui penyelenggaraan beberapa program jaminan sosial, antara lain:

- 1) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- 2) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- 3) Jaminan Hari Tua (JHT);
- 4) Jaminan Pensiun (JP);
- 5) Jaminan Kematian (JKM).

Penyelenggaraan program tersebut dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Keseluruhan program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan pendapatan.

### **d. Sistem Jaminan Sosial sebagai Instrumen Pembangunan Manusia**

Dalam *Human Development Report* (UNDP) tahun 2024, perlindungan sosial diidentifikasi sebagai salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan manusia. Program perlindungan sosial mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, memperpanjang usia harapan hidup, meningkatkan partisipasi sekolah, serta mengurangi kerentanan rumah tangga miskin terhadap berbagai guncangan ekonomi.

*World Bank* tahun 2022 menjelaskan bahwa investasi pada perlindungan sosial memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas modal manusia. Rumah tangga yang memperoleh perlindungan sosial cenderung memiliki tingkat konsumsi yang lebih stabil, akses pendidikan yang lebih baik, serta kemampuan yang lebih tinggi dalam mempertahankan kesehatan anggota keluarga. Oleh karena itu, perlindungan sosial dipandang sebagai salah satu instrumen yang mampu mempercepat peningkatan *Human Development Index*.

Di Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional telah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar, menurunkan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikian pula, program bantuan sosial seperti PKH terbukti meningkatkan angka partisipasi sekolah, memperbaiki status gizi anak, dan mengurangi tingkat kemiskinan

ekstrem. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa sistem jaminan sosial memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan pembangunan manusia.

### **Hubungan Sistem Jaminan Sosial dengan *Human Development Index***

Secara teoritis, hubungan antara sistem jaminan sosial dan *Human Development Index* dapat dijelaskan melalui peningkatan tiga dimensi utama HDI.

Pertama, program jaminan kesehatan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sehingga meningkatkan angka harapan hidup. Kedua, bantuan pendidikan dan perlindungan pendapatan meningkatkan kesempatan masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan formal sehingga meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Ketiga, bantuan sosial dan perlindungan ekonomi meningkatkan daya beli masyarakat sehingga memperbaiki standar hidup layak.

Ketiga mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem jaminan sosial secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan *Human Development Index*. Semakin luas cakupan perlindungan sosial yang diterima masyarakat, semakin besar peluang peningkatan kualitas pembangunan manusia.

### **Sintesis Teori**

Berdasarkan *Human Development Theory*, pembangunan manusia terjadi ketika individu memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sistem jaminan sosial merupakan salah satu instrumen yang mampu memperluas kesempatan tersebut melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan pendapatan, dan bantuan sosial.

Dalam penelitian ini, sistem jaminan sosial diposisikan sebagai variabel independen yang diperkirakan memberikan pengaruh positif terhadap *Human Development Index*. Integrasi sistem perlindungan sosial dengan dana zakat diharapkan menghasilkan mekanisme pembiayaan sosial yang lebih efektif sehingga mampu mempercepat peningkatan pembangunan manusia, khususnya pada kawasan tertinggal Indonesia.

### **Pengaruh Integrasi Dana Zakat terhadap *Human Development Index* (HDI)**

Integrasi dana zakat merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pengelolaan *Islamic Social Finance* yang bertujuan meningkatkan efektivitas distribusi dana sosial Islam untuk mendukung pembangunan manusia. Integrasi tersebut tidak hanya dimaknai sebagai penghimpunan dan penyaluran zakat secara terorganisasi, tetapi juga sebagai sinergi antara lembaga pengelola zakat dengan kebijakan pembangunan pemerintah, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui pendekatan tersebut, dana zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan konsumtif, tetapi berkembang menjadi instrumen investasi sosial (*social investment*) yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.[21]

Dalam perspektif *Human Development Theory*, pembangunan manusia terjadi ketika individu memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan kemampuan (*capabilities*) melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak Sen tahun 1999. Dana zakat yang diarahkan pada pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, modal usaha produktif, dan program pemberdayaan ekonomi berpotensi memperluas kemampuan masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, zakat tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga menghasilkan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Secara konseptual, pengaruh zakat terhadap *Human Development Index* (HDI) dapat dijelaskan melalui tiga dimensi utama HDI. Pertama, pendayagunaan zakat pada sektor kesehatan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, penyediaan obat-obatan, bantuan gizi, dan layanan kesehatan preventif sehingga mampu meningkatkan angka harapan hidup. Kedua, zakat pada sektor pendidikan melalui pemberian beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, pembangunan sarana pendidikan, dan pelatihan keterampilan mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah. Ketiga, zakat produktif yang diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pemberdayaan ekonomi meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga memperbaiki standar hidup layak. Ketiga mekanisme tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki hubungan langsung dengan seluruh dimensi pembentuk *Human Development Index*. [22]

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai penelitian empiris memperkuat hubungan antara zakat dan pembangunan manusia. Distribusi zakat yang difokuskan pada sektor pendidikan dan kemanusiaan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan *Human Development Index* di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi pendayagunaan zakat mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar. Hasil tersebut mendukung pandangan bahwa zakat merupakan instrumen pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada redistribusi pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. [23]

Pengelolaan *Islamic Social Finance* yang terintegrasi mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas kelembagaan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Integrasi zakat dengan instrumen sosial Islam lainnya menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat dibandingkan pengelolaan yang dilakukan secara parsial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas zakat sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan sinergi antarlembaga.

Hasil serupa ditemukan oleh berbagai penelitian internasional yang menunjukkan bahwa zakat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga, serta pembangunan modal manusia (*human capital*). Dana zakat yang dikelola secara produktif mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik sehingga menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, zakat semakin dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan penghapusan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesehatan yang baik, dan pengurangan ketimpangan. [24]

Meskipun sebagian besar penelitian menunjukkan hubungan positif antara zakat dan pembangunan manusia, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya realisasi penghimpunan zakat dibandingkan potensi nasional. Selain itu, sebagian lembaga pengelola zakat masih lebih banyak menyalurkan dana dalam bentuk bantuan konsumtif daripada program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan dampak zakat terhadap pembangunan manusia belum optimal di berbagai daerah.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menganalisis pengaruh zakat terhadap kemiskinan, kesejahteraan, atau pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang secara khusus menguji hubungan integrasi dana zakat dengan *Human Development Index*, terutama pada kawasan tertinggal Indonesia, masih relatif terbatas. Kesenjangan penelitian

(*research gap*) ini menunjukkan perlunya kajian yang mengintegrasikan zakat dengan kebijakan pembangunan manusia agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi *Islamic Social Finance* terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, integrasi dana zakat dengan program pemerintah memiliki peluang yang sangat besar. Pemerintah telah mengembangkan berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Apabila program-program tersebut disinergikan dengan pendayagunaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS dan lembaga amal zakat lainnya, maka efektivitas pembiayaan pembangunan manusia akan semakin meningkat. Integrasi tersebut memungkinkan terjadinya efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi duplikasi program, memperluas cakupan penerima manfaat, serta meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara lebih merata.

Berdasarkan *Human Development Theory*, teori *Islamic Social Finance*, serta hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa integrasi dana zakat memiliki hubungan positif dengan Human Development Index. Semakin tinggi tingkat integrasi dana zakat dalam mendukung program pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi, maka semakin besar peluang peningkatan kualitas pembangunan manusia pada kawasan tertinggal Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa integrasi dana zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Human Development Index*.

## **Pengaruh Sistem Jaminan Sosial terhadap *Human Development Index***

Sistem jaminan sosial merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Dalam perspektif *Human Development Theory*, pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan individu untuk memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan pendapatan, dan kesempatan hidup yang layak. Oleh karena itu, keberadaan sistem jaminan sosial dipandang sebagai mekanisme yang mampu memperluas *capabilities* masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Amartya Sen (1999), sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan *Human Development Index* (HDI).

Menurut *International Labour Organization* (ILO), perlindungan sosial merupakan seperangkat kebijakan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap berbagai risiko sosial sepanjang siklus kehidupan, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, kecelakaan kerja, kemiskinan, disabilitas, dan usia lanjut. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai program jaminan kesehatan, jaminan pensiun, bantuan sosial, jaminan ketenagakerjaan, serta berbagai bentuk transfer sosial lainnya. ILO menegaskan bahwa sistem perlindungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Secara teoritis, hubungan antara sistem jaminan sosial dan *Human Development Index* dapat dijelaskan melalui tiga dimensi pembentuk HDI. Pertama, jaminan kesehatan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga berdampak pada peningkatan angka harapan hidup. Kedua, berbagai program bantuan pendidikan, subsidi pendidikan, maupun bantuan tunai bersyarat meningkatkan kesempatan masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan formal sehingga berkontribusi terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Ketiga, perlindungan pendapatan melalui bantuan sosial dan program jaminan sosial mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga meningkatkan standar hidup yang layak. Dengan demikian, sistem

jaminan sosial memiliki hubungan langsung dengan seluruh komponen penyusun *Human Development Index*.

Dalam perspektif *Social Protection Theory*, perlindungan sosial memiliki empat fungsi utama, yaitu fungsi protektif (*protective*), preventif (*preventive*), promotif (*promotive*), dan transformatif (*transformative*). Fungsi protektif bertujuan mengurangi dampak kemiskinan melalui bantuan sosial. Fungsi preventif mencegah masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan akibat risiko sosial melalui skema asuransi sosial. Fungsi promotif meningkatkan produktivitas masyarakat melalui investasi pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, fungsi transformatif diarahkan pada pengurangan ketimpangan sosial melalui kebijakan yang mendorong keadilan dan inklusi. Keempat fungsi tersebut secara simultan mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Di Indonesia, implementasi sistem jaminan sosial diwujudkan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Keseluruhan program tersebut dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan sehingga mendukung pembangunan manusia secara berkelanjutan.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa sistem jaminan sosial memberikan dampak positif terhadap pembangunan manusia. Laporan *World Social Protection Report 2020-2022* menjelaskan bahwa negara-negara yang memiliki cakupan perlindungan sosial yang lebih luas cenderung menunjukkan indikator kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan negara dengan cakupan perlindungan sosial yang rendah. Perlindungan sosial juga terbukti meningkatkan ketahanan rumah tangga terhadap krisis ekonomi serta mengurangi risiko kemiskinan antargenerasi.

Bank Dunia juga menegaskan bahwa investasi pada perlindungan sosial merupakan salah satu strategi utama dalam memperkuat modal manusia (*human capital*). Program bantuan sosial yang tepat sasaran mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga, menjaga keberlangsungan pendidikan anak, memperbaiki status kesehatan masyarakat, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, perlindungan sosial tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa pengurangan kemiskinan, tetapi juga menghasilkan manfaat jangka panjang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam konteks kawasan tertinggal di Indonesia, keberadaan sistem jaminan sosial memiliki arti yang semakin penting. Wilayah tertinggal umumnya menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kesempatan kerja. Program perlindungan sosial berperan sebagai instrumen yang mampu mengurangi kesenjangan tersebut melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Oleh karena itu, efektivitas sistem jaminan sosial di kawasan tertinggal diperkirakan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan *Human Development Index* dibandingkan wilayah yang telah memiliki tingkat pembangunan relatif tinggi.

Meskipun demikian, efektivitas sistem jaminan sosial masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas basis data, koordinasi antarlembaga, keterbatasan kapasitas fiskal, serta kesenjangan akses layanan antarwilayah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perlindungan sosial akan memberikan dampak yang

lebih optimal apabila didukung oleh tata kelola yang baik, integrasi data, digitalisasi layanan, serta sinergi dengan berbagai instrumen pembangunan lainnya, termasuk *Islamic Social Finance*.

Dalam penelitian ini, sistem jaminan sosial diposisikan sebagai variabel independen yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap *Human Development Index*. Semakin efektif pelaksanaan sistem jaminan sosial melalui peningkatan cakupan kepesertaan, kualitas pelayanan, ketepatan sasaran bantuan, serta keberlanjutan program, maka semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa sistem jaminan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Human Development Index* pada kawasan tertinggal di Indonesia.

## **Sinergi Integrasi Dana Zakat dan Sistem Jaminan Sosial terhadap *Human Development Index***

Pembangunan manusia merupakan proses multidimensional yang memerlukan dukungan berbagai instrumen kebijakan secara terpadu. Dalam konteks Indonesia, peningkatan *Human Development Index* (HDI) tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan sosial, kualitas tata kelola pemerintahan, serta optimalisasi berbagai sumber pembiayaan pembangunan. Salah satu pendekatan yang mulai mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir adalah sinergi antara integrasi dana zakat dengan sistem jaminan sosial nasional sebagai strategi untuk mempercepat peningkatan kualitas pembangunan manusia, khususnya pada wilayah tertinggal dan kelompok masyarakat rentan.

Menurut *Human Development Theory* yang dikemukakan Sen (1999), pembangunan manusia bertujuan memperluas *capabilities* atau kemampuan individu agar mampu menjalani kehidupan yang sehat, berpendidikan, produktif, dan bermartabat. Pencapaian tujuan tersebut memerlukan dukungan berbagai kebijakan publik maupun instrumen sosial yang mampu menghilangkan hambatan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap pelayanan dasar. Dalam konteks tersebut, dana zakat dan sistem jaminan sosial memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Integrasi dana zakat dengan sistem jaminan sosial merupakan bentuk kolaborasi antara instrumen *Islamic Social Finance* dan kebijakan perlindungan sosial pemerintah. Dana zakat memiliki fleksibilitas dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat, seperti beasiswa pendidikan, layanan kesehatan, bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, rehabilitasi sosial, serta pengembangan ekonomi produktif. Di sisi lain, sistem jaminan sosial menyediakan perlindungan dasar melalui program jaminan kesehatan, bantuan sosial, perlindungan ketenagakerjaan, dan jaminan pendapatan. Apabila kedua instrumen tersebut dikelola secara terpadu, maka akan tercipta mekanisme perlindungan sosial yang lebih komprehensif sehingga mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara berkelanjutan.[25]

Dalam perspektif *Social Protection Theory*, integrasi berbagai instrumen perlindungan sosial akan meningkatkan efektivitas kebijakan karena mampu memperluas cakupan penerima manfaat, mengurangi tumpang tindih program, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta memperkuat koordinasi antarlembaga. Sinergi antara zakat dan sistem jaminan sosial juga dapat mengurangi kesenjangan pembiayaan program sosial, khususnya pada sektor

pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Dengan demikian, integrasi tersebut berpotensi memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan apabila kedua instrumen dijalankan secara terpisah.

Dalam praktiknya, beberapa negara telah mulai mengembangkan model integrasi antara keuangan sosial Islam dan sistem perlindungan sosial nasional. *Islamic Development Bank* (2023) menjelaskan bahwa sinergi antara zakat, wakaf, sedekah, dan program perlindungan sosial pemerintah mampu meningkatkan efektivitas pengurangan kemiskinan, memperluas inklusi keuangan, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Model tersebut menekankan pentingnya koordinasi kelembagaan, integrasi basis data penerima manfaat, transparansi tata kelola, dan penguatan regulasi sebagai faktor utama keberhasilan integrasi.

Di Indonesia, peluang integrasi dana zakat dengan sistem jaminan sosial sangat besar mengingat negara memiliki potensi zakat yang tinggi serta sistem perlindungan sosial yang terus berkembang. Kehadiran BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta berbagai program bantuan sosial pemerintah memberikan peluang untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui sinkronisasi data mustahik dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), koordinasi program pemberdayaan ekonomi, pembiayaan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan tata kelola kelembagaan. [26]

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara sektor publik dan lembaga filantropi Islam memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Model *Integrated Islamic Social Finance* mampu meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat melalui penguatan koordinasi antarlembaga, efisiensi distribusi dana sosial, dan peningkatan kualitas tata kelola. Sementara itu, laporan *Islamic Development Bank* (2023) menegaskan bahwa integrasi instrumen keuangan sosial Islam dengan kebijakan perlindungan sosial mampu mempercepat pengurangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Meskipun demikian, implementasi integrasi dana zakat dan sistem jaminan sosial masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi belum optimalnya koordinasi antarinstansi, perbedaan sistem pengelolaan data penerima manfaat, keterbatasan regulasi yang mengatur mekanisme integrasi, serta belum meratanya kapasitas kelembagaan pengelola zakat di berbagai daerah. Selain itu, literasi masyarakat mengenai fungsi zakat produktif masih relatif rendah sehingga sebagian besar dana zakat masih disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas integrasi memerlukan penguatan tata kelola, digitalisasi layanan, transparansi, serta dukungan regulasi yang lebih komprehensif.

Dalam penelitian ini, sinergi integrasi dana zakat dan sistem jaminan sosial dipandang sebagai strategi yang mampu mempercepat peningkatan *Human Development Index* melalui penguatan tiga dimensi utama pembangunan manusia. Pertama, peningkatan kualitas kesehatan melalui integrasi pembiayaan layanan kesehatan dan program jaminan kesehatan. Kedua, peningkatan kualitas pendidikan melalui pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin. Ketiga, peningkatan standar hidup melalui pemberdayaan ekonomi, bantuan modal usaha, perlindungan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, semakin baik tingkat integrasi antara dana zakat dan sistem

jaminan sosial, semakin besar peluang peningkatan kualitas pembangunan manusia pada kawasan tertinggal Indonesia.

Berdasarkan sintesis teori, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual yang telah diuraikan, penelitian ini berasumsi bahwa integrasi dana zakat dan sistem jaminan sosial merupakan dua instrumen yang saling melengkapi dalam meningkatkan *Human Development Index*. Sinergi keduanya tidak hanya memperkuat fungsi redistribusi kesejahteraan, tetapi juga memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak sesuai dengan prinsip pembangunan manusia yang dikemukakan oleh Amartya Sen.

### Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan *Human Development Theory*, *Human Development Index Theory*, *Islamic Social Finance Theory*, dan *Social Protection Theory*, hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Integrasi Dana Zakat ( $X_1$ )  $\rightarrow$  *Human Development Index* (Y)

Sistem Jaminan Sosial ( $X_2$ )  $\rightarrow$  *Human Development Index* (Y)

Integrasi Dana Zakat ( $X_1$ ) + Sistem Jaminan Sosial ( $X_2$ )  $\rightarrow$  *Human Development Index* (Y)

Secara konseptual, integrasi dana zakat dan sistem jaminan sosial diperkirakan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, kedua variabel independen tersebut diprediksi memiliki pengaruh positif terhadap *Human Development Index*.

### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

H1: Integrasi dana zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Human Development Index* pada kawasan tertinggal di Indonesia.

H2: Sistem jaminan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Human Development Index* pada kawasan tertinggal di Indonesia.

H3: Integrasi dana zakat dan sistem jaminan sosial secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Human Development Index* pada kawasan tertinggal di Indonesia.

## 3. Metodologi Penelitian

### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *explanatory research*, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dengan variabel dependen melalui pengujian hipotesis secara statistik.[27] Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengukuran pengaruh integrasi dana zakat dan sistem jaminan sosial terhadap *Human Development Index* (HDI) pada kawasan tertinggal di Indonesia.

Model penelitian menggunakan analisis regresi data panel, karena data penelitian menggabungkan dimensi *cross-section* (kabupaten kawasan tertinggal) dan *time series* (periode pengamatan). Penggunaan regresi panel memungkinkan analisis menjadi lebih efisien karena mampu mengakomodasi variasi data antarwilayah maupun antarperiode.[28]

Dalam artikel ini, data yang digunakan merupakan data simulasi akademik yang disusun berdasarkan karakteristik data sekunder yang tersedia pada publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BPJS, dan Kementerian PPN/Bappenas. Penyusunan data simulasi dilakukan semata-mata untuk kepentingan pembelajaran metodologi penelitian dan ilustrasi penerapan analisis statistik.

## Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian difokuskan pada kabupaten yang termasuk kategori kawasan tertinggal di Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Wilayah tersebut dipilih karena masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan manusia, seperti rendahnya kualitas pendidikan, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, tingginya tingkat kemiskinan, serta keterbatasan infrastruktur dasar.

Periode pengamatan penelitian disimulasikan selama lima tahun, yaitu 2020-2024, agar mampu menggambarkan perkembangan pembangunan manusia setelah implementasi berbagai kebijakan perlindungan sosial dan optimalisasi pengelolaan zakat nasional.

## Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah seluruh kabupaten yang termasuk kawasan tertinggal di Indonesia.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, meliputi:

- a. Kabupaten termasuk kawasan tertinggal.
- b. Memiliki data HDI yang tersedia selama periode pengamatan.
- c. Memiliki informasi mengenai penghimpunan atau distribusi dana zakat.
- d. Memiliki cakupan program sistem jaminan sosial.

Dalam simulasi penelitian digunakan 62 kabupaten selama lima tahun sehingga diperoleh 310 unit observasi.

## Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan data sekunder.

Data diperoleh dari berbagai sumber resmi, yaitu:

- a. Badan Pusat Statistik (BPS)
- b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- c. BPJS Kesehatan
- d. BPJS Ketenagakerjaan
- e. Kementerian Sosial
- f. Kementerian PPN/Bappenas
- g. *Human Development Report* (UNDP)

Seluruh data dalam artikel ini merupakan simulasi akademik yang disusun berdasarkan karakteristik publikasi resmi tersebut.

## Variabel Penelitian

Penelitian menggunakan tiga variabel.

1) Variabel Dependen (Y)

*Human Development Index* (HDI)

Diukur menggunakan nilai IPM yang dipublikasikan oleh BPS.

- Indikator:
- a. Umur harapan hidup
  - b. Harapan lama sekolah
  - c. Rata-rata lama sekolah
  - d. Pengeluaran riil per kapita
- 2) Variabel Independen ( $X_1$ )
- Integrasi Dana Zakat
- Diukur menggunakan indikator:
- a. Penghimpunan zakat
  - b. Penyaluran zakat
  - c. Program pendidikan
  - d. Program kesehatan
  - e. Program pemberdayaan ekonomi
  - f. Program sosial
- 3) Variabel Independen ( $X_2$ )
- Sistem Jaminan Sosial
- Diukur melalui:
- a. Kepesertaan BPJS Kesehatan
  - b. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
  - c. Program PKH
  - d. Bantuan sosial
  - e. Program perlindungan sosial lainnya

| Definisi Operasional Variabel   |                                            |                             |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Variabel                        | Definisi Operasional                       |                             | Indikator      Skala |
| HDI (Y)                         | Tingkat pembangunan manusia                |                             | IPM      Rasio       |
| Integrasi Dana Zakat ( $X_1$ )  | Tingkat integrasi zakat dengan pembangunan | n, distribusi, pemberdayaan | Penghimpuna Rasio    |
| Sistem Jaminan Sosial ( $X_2$ ) | Tingkat perlindungan sosial masyarakat     | BPJS, PKH, bansos           | Rasio                |

Sumber: Dikembangkan oleh penulis (2026).

Teknik Analisis Data

- Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel.
- Tahapan analisis meliputi:
- Statistik Deskriptif
- Meliputi:
- a. Mean
  - b. Median
  - c. Maksimum
  - d. Minimum

e. Standar deviasi

Pemilihan Model Regresi

Model terbaik dipilih melalui:

a. Uji Chow

Menentukan apakah *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* lebih sesuai.

Hipotesis:

H0 : *Common Effect*

H1 : *Fixed Effect*

Keputusan berdasarkan probabilitas < 0,05.

b. Uji Hausman

Menentukan apakah *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang digunakan.

H0 : *Random Effect*

H1 : *Fixed Effect*

c. Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Digunakan apabila hasil Uji Chow memilih *Common Effect*.

Model Penelitian

Persamaan regresi:

$$HDI_{it} = \beta_0 + \beta_1 ZAKAT_{it} + \beta_2 SJS_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$HDI_{it}$  = Human Development Index kabupaten  $i$  pada tahun  $t$ .

$\beta_0$  = konstanta.

$\beta_1$  = koefisien regresi integrasi dana zakat.

$\beta_2$  = koefisien regresi sistem jaminan sosial.

$ZAKAT_{it}$  = integrasi dana zakat.

$SJS_{it}$  = sistem jaminan sosial.

$\varepsilon_{it}$  = galat (error term).

Koefisien  $\beta_1$  menunjukkan besarnya perubahan Human Development Index akibat perubahan integrasi dana zakat, sedangkan koefisien  $\beta_2$  menunjukkan pengaruh sistem jaminan sosial terhadap *Human Development Index* dengan asumsi variabel lain tetap.

### Pengujian Hipotesis

Uji t

Mengukur pengaruh parsial masing-masing variabel independen.

Kriteria:

- Sig < 0,05 → berpengaruh signifikan
- Sig > 0,05 → tidak signifikan

(Gujarati & Porter, 2022)

Uji F

Mengukur pengaruh simultan.

Kriteria:

Sig < 0,05

Koefisien Determinasi (Adjusted  $R^2$ )

Digunakan untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variasi HDI.

Semakin besar nilai Adjusted  $R^2$ , semakin baik kemampuan model penelitian.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### Proses Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data simulasi yang disusun berdasarkan karakteristik data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, serta *Human Development Report* UNDP. Penyusunan data simulasi bertujuan untuk memberikan ilustrasi penerapan analisis regresi data panel pada penelitian mengenai pengaruh integrasi dana zakat dan sistem jaminan sosial terhadap *Human Development Index* (HDI).

Objek penelitian adalah kabupaten yang termasuk kategori kawasan tertinggal di Indonesia. Periode pengamatan disimulasikan selama lima tahun, yaitu 2020-2024 sehingga diperoleh 310 unit observasi. Seluruh data dianalisis menggunakan regresi data panel melalui tahapan statistik deskriptif, pemilihan model terbaik, pengujian hipotesis, dan interpretasi hasil.

##### Hasil Analisis Data

###### *Statistik Deskriptif*

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik masing-masing variabel penelitian.

**Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

| Variabel              | Mean  | Median | Maksimum | Minimum | Std. Deviasi |
|-----------------------|-------|--------|----------|---------|--------------|
| HDI                   | 66,84 | 66,53  | 81,22    | 52,31   | 5,82         |
| Integrasi Dana Zakat  | 4,92  | 4,85   | 8,74     | 1,43    | 1,61         |
| Sistem Jaminan Sosial | 73,48 | 74,11  | 95,60    | 51,73   | 8,96         |

Sumber: Data diolah penulis (2026)

Berdasarkan Tabel 4.1, rata-rata *Human Development Index* sebesar 66,84, yang menunjukkan bahwa sebagian besar daerah penelitian berada pada kategori pembangunan manusia sedang. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa variasi data relatif homogen.

Variabel integrasi dana zakat memiliki rata-rata sebesar 4,92, sedangkan sistem jaminan sosial memiliki rata-rata sebesar 73,48. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program perlindungan sosial relatif lebih merata dibandingkan optimalisasi integrasi dana zakat.

##### Pemilihan Model Regresi Data Panel

###### *Uji Chow*

Uji Chow dilakukan untuk menentukan apakah model yang digunakan adalah *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*.

**Tabel 4.2 Hasil Uji Chow**

| Statistik       | Nilai  |
|-----------------|--------|
| Cross-section F | 12,763 |
| Probabilitas    | 0,0000 |

Karena nilai probabilitas  $0,0000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak sehingga model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

#### Uji Hausman

Selanjutnya dilakukan Uji Hausman untuk menentukan apakah model terbaik adalah *Fixed Effect* atau *Random Effect*.

Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman

| Statistik    | Nilai  |
|--------------|--------|
| Chi-square   | 14,572 |
| Probabilitas | 0,0013 |

Karena probabilitas  $0,0013 < 0,05$ , maka model terbaik adalah *Fixed Effect Model*. Dengan demikian analisis selanjutnya menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM).

#### Hasil Estimasi Regresi

Tabel 4.4 Hasil Regresi Data Panel (*Fixed Effect Model*)

| Variabel              | Koefisien | t-Statistik | Probabilitas |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------|
| Konstanta             | 41,285    | 7,846       | 0,0000       |
| Integrasi Dana Zakat  | 0,867     | 3,782       | 0,0002       |
| Sistem Jaminan Sosial | 0,316     | 2,914       | 0,0041       |

$$R^2 = 0,764$$

$$\text{Adjusted } R^2 = 0,748$$

$$F\text{-statistic} = 41,836$$

$$\text{Prob}(F\text{-statistic}) = 0,000000$$

Sumber: Data simulasi diolah (2026).

Berdasarkan hasil estimasi regresi, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$HDI = 41,285 + 0,867 (\text{Zakat}) + 0,316 (\text{SJSN})$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan integrasi dana zakat diperkirakan meningkatkan *Human Development Index* sebesar 0,867 poin, sedangkan peningkatan satu satuan sistem jaminan sosial diperkirakan meningkatkan *Human Development Index* sebesar 0,316 poin, dengan asumsi variabel lain tetap.

#### Uji Hipotesis

##### Uji t (*Parsial*)

Berdasarkan hasil regresi diperoleh:

Pengaruh Integrasi Dana Zakat terhadap HDI

Nilai probabilitas sebesar 0,0002 lebih kecil dari 0,05.

Dengan demikian  $H_1$  diterima.

Artinya integrasi dana zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Human Development Index*.

Pengaruh Sistem Jaminan Sosial terhadap HDI

Nilai probabilitas sebesar 0,0041 lebih kecil dari 0,05.

Dengan demikian  $H_2$  diterima.

Artinya sistem jaminan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Human Development Index*.

### ***Uji F (Simultan)***

Nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,0000.

Karena lebih kecil dari 0,05 maka H3 diterima.

Artinya integrasi dana zakat dan sistem jaminan sosial secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Human Development Index*.

### ***Koefisien Determinasi***

Nilai Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,748.

Artinya sekitar 74,8% variasi *Human Development Index* dapat dijelaskan oleh integrasi dana zakat dan sistem jaminan sosial.

Sisanya 25,2% dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### ***Pengaruh Integrasi Dana Zakat terhadap Human Development Index***

Hasil simulasi menunjukkan bahwa integrasi dana zakat berpengaruh positif terhadap *Human Development Index*. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin optimal pengelolaan dana zakat yang diintegrasikan dengan program pembangunan pemerintah, maka semakin tinggi kualitas pembangunan manusia.

Hasil tersebut sejalan dengan *Human Development Theory* yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999) bahwa pembangunan manusia bertujuan memperluas kemampuan (*capabilities*) masyarakat dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak.

Dana zakat yang diarahkan pada program beasiswa, bantuan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pelatihan keterampilan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga berkontribusi terhadap peningkatan *Human Development Index*. Distribusi zakat produktif memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan *Human Development Index* di Indonesia.[29] Pengelolaan *Islamic Social Finance* secara terintegrasi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.[30]

### ***Pengaruh Sistem Jaminan Sosial terhadap Human Development Index***

Hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem jaminan sosial memiliki pengaruh positif terhadap *Human Development Index*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin baik implementasi program perlindungan sosial maka semakin tinggi kualitas pembangunan manusia. Hasil ini mendukung *Social Protection Theory* yang menjelaskan bahwa perlindungan sosial merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia.

Program seperti BPJS Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial, dan perlindungan ketenagakerjaan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, serta menjaga daya beli masyarakat. Temuan tersebut juga konsisten dengan laporan ILO (2021) dan World Bank (2022) yang menyatakan bahwa negara dengan cakupan perlindungan sosial yang luas memiliki kualitas pembangunan manusia yang lebih baik.

## ***Pengaruh Integrasi Dana Zakat dan Sistem Jaminan Sosial terhadap Human Development Index***

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa integrasi dana zakat dan sistem jaminan sosial secara bersama-sama memberikan pengaruh positif terhadap *Human Development Index*. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua instrumen saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Dana zakat mampu memberikan fleksibilitas dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan usaha produktif.

Sementara itu sistem jaminan sosial memberikan perlindungan dasar terhadap berbagai risiko sosial. Kolaborasi kedua instrumen tersebut menciptakan mekanisme pembangunan yang lebih komprehensif sehingga mampu mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Temuan ini memperkuat laporan *Islamic Development Bank* (2023) yang menyatakan bahwa integrasi *Islamic Social Finance* dengan kebijakan perlindungan sosial merupakan strategi yang efektif dalam mempercepat pencapaian *Sustainable Development Goals*.

### **Implikasi Penelitian**

#### **a. Implikasi Teoritis**

Penelitian ini memperkuat *Human Development Theory* yang dikemukakan Sen (1999), bahwa peningkatan pembangunan manusia tidak hanya dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh perluasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Temuan simulasi juga menunjukkan bahwa integrasi *Islamic Social Finance* dengan kebijakan perlindungan sosial dapat menjadi pendekatan yang relevan dalam menjelaskan peningkatan *Human Development Index*.

#### **b. Implikasi Praktis**

Pemerintah perlu memperkuat sinergi antara BAZNAS, Lembaga Amil Zakat, BPJS, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah agar program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, serta kesehatan dapat berjalan secara terpadu. Selain itu, digitalisasi data penerima manfaat dan peningkatan koordinasi antarlembaga dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan.

#### **c. Implikasi Kebijakan**

Optimalisasi integrasi dana zakat dengan sistem jaminan sosial dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan untuk mempercepat peningkatan kualitas pembangunan manusia, khususnya pada kawasan tertinggal. Penguatan regulasi, tata kelola yang transparan, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai zakat produktif diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

## **5. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh integrasi dana zakat dan sistem jaminan sosial terhadap *Human Development Index* (HDI) pada kawasan tertinggal di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis data simulasi dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, integrasi dana zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Human Development Index*. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat yang terintegrasi dengan program pembangunan, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Temuan ini

mendukung *Human Development Theory* yang dikemukakan oleh Amartya Sen, bahwa pembangunan manusia ditentukan oleh perluasan kemampuan (*capabilities*) masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang sehat, berpendidikan, dan produktif.

Kedua, sistem jaminan sosial juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Human Development Index*. Program perlindungan sosial, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial, dan berbagai bentuk perlindungan pendapatan lainnya, terbukti berkontribusi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Temuan ini memperkuat *Social Protection Theory* yang menyatakan bahwa perlindungan sosial merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia.

Ketiga, integrasi dana zakat dan sistem jaminan sosial secara simultan memberikan pengaruh positif terhadap *Human Development Index*. Sinergi kedua instrumen tersebut mampu memperkuat efektivitas pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara *Islamic Social Finance* dan sistem jaminan sosial nasional berpotensi menjadi strategi yang efektif dalam mempercepat peningkatan kualitas pembangunan manusia, khususnya di kawasan tertinggal Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. S. Pambudi, "Analisis Keterkaitan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan," *Monas J. Inov. Apar.*, vol. 2, no. 1, hal. 109-123, 2020, doi: 10.54849/monas.v2i1.14.
- [2] M. Sustainable, D. Goals, N. Sitorus, dan J. Nasution, "Peranan Program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) Dalam," *Econ. Rev. J.*, vol. 3, hal. 45-60, 2024, doi: 10.56709/mrj.v3i1.108.
- [3] M. Y. Siregar, Y. A. Gultom, dan S. Batubara, "Peran Instrumen Keuangan Sosial Islam dalam Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia," *Sinergi J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 2, no. 6, hal. 3102-3116, 2026, doi: 10.66914/m4d8wy72.
- [4] K. A. Zainal Muttaqin, Suharsono, "Pengaruh Zakat Terhadap Sustainable Development Goals di Indonesia (Studi pada Seluruh Provinsi di Pulau Jawa)," *QULUBANA J. Manaj. Dakwah*, vol. 4, no. 1, hal. 87-113, 2023, doi: 10.54396/qlb.v4i1.939.
- [5] S. Q. Sihidiq Gumelar, "Pembangunan Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Konsep dan Implikasi Terhadap Pembangunan Di Indonesia," *NAAFI J. Ilm. Mhs.*, vol. 2, no. 2, 2025, doi: 10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.149.
- [6] dan M. H. . . D. A.A.K. Ayuningsari, M.K.S Budhi, I.N.M Yasa, A.A.I.N Marhaeni, I.K. Subidia, "Can The Welfare of Hindu Clergy in Bali Be Assesed Using Amartya Sen's Capability Approach," *Santhet J. Sejarah, Pendidik. Dan Hum.*, vol. 7, no. 1, hal. 121-137, 2023, doi: 10.36526/js.v3i2.e-ISSN.
- [7] dan I. M. Adnin Chiesa Syahwanes, Eli Apud Saepudin, Listia Ulya Madina, Shabna Azzahra, "Evaluasi Dampak PKH Terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Akses Layanan Sosial bagi Keluarga Miskin. Analisis Mencakup Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Ekopedia J. Ilm. Ekon.*, vol. 1, no. 2, hal. 176-183, 2025, doi: 10.63822/j6s5v471.
- [8] D. Sholihah, "Mengembangkan Islamic Sosial Finance (ISF) yang Terintegrasi dalam Upaya Mendukung Implementasi SDGs (Sustainable development Goals)," *LAN TABUR J. Ekon. Syari'ah*, vol. 5, no. 2, hal. 395-408, 2024, doi: 10.53515/lt.v5i2.142.
- [9] M. S. Kurnia, "Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia," *IQTISHADUNA J. Ilm. Ekon. Kita*, vol. 9, no. 2, hal. 174-185, 2020, doi:

10.46367/iqtishaduna.v9i2.245.

- [10] A. G. Nurrahman, I. Miptahudin, H. Fajrussalam, V. Nur, dan R. Rhommadhonni, "Analisis Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi Konseptual dan Relevansinya terhadap Tujuan Maqashid Syariah Analysis of the Human Development Index ( HDI ) from an Islamic Economic Perspective : A Conceptual Study and I," *J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 04, no. 02, hal. 197-203, 2025, doi: 10.37968/jhesy.v4i2.1612.
- [11] A. Rahmat, "Dampak Pengangguran Terhadap Kesejahteraan Sosial di," *Econ. Digit. Bus. Rev.*, vol. 7, no. 1, hal. 539-551, 2025.
- [12] D. I. Ginting dan I. Lubis, "Pengaruh Angka Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia," *J. Bisnis Net*, vol. 6, no. 2, hal. 519-528, 2023.
- [13] T. Azahrah, S. Bella, S. Martodiryo, M. A. Permatasari, M. F. Nicky, dan G. Ratumbuysang, "Analisis Rata-Rata Lama-Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita Sebagai Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Tabalong," *J. Pendidik. Ekon.*, vol. 13, no. 3, hal. 225-233, 2025, doi: 10.26740/jupe.v13n3.p225-233.
- [14] N. A. S. Cita Putri Calista, Firzan Achriansyah Izazi Putra, Felliza Maulita, Mahirah Zahra, "Kesenjangan Pendidikan Antara Wilayah Pedesaan dan Perkotaan: Analisis Kebijakan dan Praktik di Indonesia," *Integr. Perspect. Soc. Sci. J.*, vol. 2, no. 3, hal. 3965-3978, 2025.
- [15] F. Fatza, A. Satriawan, dan S. Aisyah, "Analisis Kualitas Pembangunan Manusia dan Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *Indones. J. Digit. Bus.*, vol. 5, no. 4, hal. 1627-1640, 2026.
- [16] Y. S. J. N. Kusmilawaty, M. Fizdian Arismunandar, Ahmad Alauddin Sultoni, Saparuddin Siregar, "Integrasi Good Amil Governance dan Sustainable Development Goals (SDGs): Tantangan dan Peluang," *JIEI (Jurnal Ilm. Ekon. Islam.)*, vol. 11, no. 02, hal. 112-129, 2025.
- [17] J. Jamal, "Studi Ayat-Ayat Zakat Profesi sebagai Kajian Dalam Ekonomi Islam," *J. Huk. Ekon. Syariah*, no. 1984, hal. 55-66, 2018.
- [18] A. S. Fajrina, Alifah Nur., Putra, Farhan Rafi., Sisilia, "JIEFeS Optimalisasi Pengelolaan Zakat : Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian JIEFeS," *J. Islam. Econ. Financ. Stud.*, vol. 4, no. 1, hal. 100-120, 2020, doi: 10.47700/jiefes.v1i1.1918.
- [19] F. Muin, "Kebijakan Hukum Jaminan Asuransi Sosial Kesehatan : Pendekatan Pemenuhan Kesetaraan Dalam Jaminan Kesehatan Nasional," *Pros. Konf. Nas.*, vol. 2, no. 1, 2024, doi: 10.55292/87afgy93.
- [20] P. D. Amanda, Y. Najwa, dan S. Al-, "Analisis Efektivitas Program Perlindungan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Rentan Di Indonesia," *AL-I'TIMAD J. Dakwah dan Pengemb. Masy. Islam*, vol. 2, no. 1, hal. 1-20, 2024, doi: 10.35878/alitimad.v2i1.1131.
- [21] R. A. Muhammad, M. Amir, dan H. Bin, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Instrumen Fiskal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat: Perspektif Integrasi Zakat dalam APBN," *Ziswaf Asfa J. Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf*, no. 2, hal. 100-116, 2025, doi: 10.69948/ziswaf.41.
- [22] S. Nugraha, Z. A. Malik, dan N. D. Himayasari, "Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik," *J. Ris. Ekon. Syariah*, vol. 4, no. 1, hal. 31-38, 2024, doi: 0.29313/jres.v4i1.3666.
- [23] J. J. Pendidikan, N. Hikmah, I. Y. Aviva, H. H. Widagdo, dan H. Monady, "Peran Zakat Infak Sedekah dalam Mewujudkan Sustainable Developments Goals melalui Program Pendidikan Laznas Yakesma Kalimantan Tengah," *J. el-Huda J. Pendidikan, Sos. dan Keagamaan*, vol. 17, no. 1, hal. 1-8, 2026, doi: 10.59702/el-huda.v17i01.431.
- [24] A. Peran dan M. Tingkat, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia," *Arus J. Sos. dan Hum. ( AJSH )*, vol. 5, no. 3, hal. 5419-5427, 2025, doi: 10.57250/ajsh.v5i3.2140.
- [25] M. A. Hariyanto, Eri., Junaidi, "Sinergi Pengelolaan Zakat dan Program Bantuan Sosial

Pemerintah Untuk Mereduksi Kemiskinan,” *J. BPPK*, vol. 16, 2023.

[26] A. T. Al-labiyah, L. N. Aulia, N. A. Annisa, L. P. Sari, dan P. Korespondensi, “Peran ZIS Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Indonesia,” *Islam. Econ. Bus. Rev.*, vol. 2, no. 2, hal. 168-185, 2023, doi: 10.59580/iesbir.v2i2.6003.

[27] M. Sari, H. Rachman, N. J. Astuti, M. W. Afgani, dan R. Abdullah, “Explanatory Survey dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif,” *J. Pendidik. Sains dan Komput.*, vol. 3, no. 1, hal. 10-16, 2023, doi: 10.47709/jpsk.v3i01.1953.

[28] V. N. Juli, D. C. Haryati, G. Masitoh, W. Saputra, dan T. Subarkah, “Analisis Efisiensi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia : Pendekatan Data Panel,” *GEMILANG J. Manaj. dan Akunt.*, vol. 5, no. 3, 2025, doi: 10.56910/gemilang.v5i3.2185.

[29] D. Yuniar, W. Nisfulaili, D. Oktaviani, dan F. Alpiliano, “Pengaruh Zakat , Infaq , dan Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Periode 2019-2023,” *J. Ekon. Syariah Pelita Bangsa*, vol. 10, no. 02, hal. 330-342, 2025, doi: 10.37366/jespb.v10i02.2520.

[30] L. Y. Lestari, M. A. Adlan, dan M. Aswad, “Islamic Social Finance untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan Melalui Instrumen Ziswaf Ditinjau dari Pemikiran Abu Ubaid,” *Wacana Equiliberium J. Pemikir. Penelit. Ekon.*, vol. 13, no. 01, hal. 55-65, 2025, doi: 10.31102/equilibrium.13.01.55-65.